

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kebijakan konservasi Geopark Dieng merupakan bentuk inovasi pengelolaan kawasan strategis lintas wilayah yang menggabungkan kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan dua kabupaten yaitu Banjarnegara dan Wonosobo. Berdasarkan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), keberhasilan kebijakan semacam ini sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor yang terlibat untuk membangun kolaborasi yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada tujuan bersama. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik kolaborasi dalam kebijakan konservasi Geopark Dieng masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan relasional.

Hambatan paling dominan adalah ketimpangan kewenangan antar level pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menetapkan bahwa kewenangan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan kawasan lindung berada di tangan pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini berdampak pada terbatasnya peran pemerintah kabupaten dalam perumusan dan penetapan arah kebijakan Geopark Dieng. Pemerintah kabupaten lebih berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan, sementara keputusan strategis banyak diputuskan di tingkat provinsi. Kondisi ini memperkuat asumsi Ansell & Gash (2008) bahwa

kolaborasi yang tidak disertai distribusi kekuasaan yang seimbang cenderung berubah menjadi relasi konsultatif semata, bukan kolaboratif.

Selain faktor kewenangan, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala serius dalam implementasi kebijakan. Pemerintah kabupaten hanya mengandalkan alokasi APBD yang terbatas, sementara dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat bersifat tidak reguler. Akibatnya, banyak program konservasi, edukasi, dan promosi berhenti di tahap rencana atau bersifat seremonial. Ketergantungan fiskal ini membuat efektivitas kolaborasi bergantung pada kapasitas aktor dominan, bukan kesetaraan kontribusi antar pihak.

Dari sisi kepentingan (interest), terdapat perbedaan fokus antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas pariwisata dan BAPPEDA memiliki kepentingan yang tinggi karena Geopark Dieng dinilai sebagai instrumen penggerak ekonomi dan promosi wisata daerah. Sebaliknya sektor lain lebih melihatnya sebagai tugas tambahan. Menurut Mitchell, Agle, dan Wood (1997), perbedaan tingkat kepentingan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan partisipasi, di mana pihak yang memiliki kepentingan rendah cenderung pasif dalam proses kolaborasi.

Perbedaan persepsi urgensi (urgency) juga memengaruhi kecepatan implementasi kebijakan. Bagi sebagian daerah, pengembangan Geopark Dieng dianggap agenda jangka panjang yang tidak seprioritas program pembangunan lainnya. Persepsi ini memperlambat tindak lanjut kebijakan konservasi, terutama dalam upaya integrasi lintas sektor.

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan konservasi Geopark Dieng masih belum sepenuhnya optimal. Hambatan kewenangan, keterbatasan anggaran, serta perbedaan kepentingan dan urgensi antar *stakeholder* menyebabkan proses kolaborasi belum berjalan seimbang. Namun, upaya untuk menjadikan geopark sebagai instrumen pendidikan, ekonomi, dan konservasi menunjukkan arah positif menuju pengelolaan kawasan yang lebih berkelanjutan.

Keberhasilan Geopark Dieng sangat bergantung pada kemampuan para aktor untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah, menata ulang hubungan kekuasaan, serta memastikan keberlanjutan pendanaan dan integrasi kebijakan. Kolaborasi yang sejati bukan hanya soal koordinasi antar instansi, tetapi juga menciptakan setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pelestarian dan pengembangan Dieng sebagai kawasan geopark nasional.

#### **4.2. Keterbatasan Penelitian**

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai hambatan kolaborasi dalam implementasi kebijakan konservasi Geopark Dieng ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi validitas temuan, namun menjadi catatan penting untuk pengembangan kajian selanjutnya.

Penelitian ini belum mengukur efektivitas kebijakan secara kuantitatif, seperti capaian indikator konservasi, peningkatan pendapatan masyarakat, atau

pertumbuhan kunjungan wisata berbasis geopark. Pendekatan kualitatif yang digunakan sangat efektif untuk mengungkap dinamika dan hambatan kolaborasi, namun belum mampu menunjukkan tingkat keberhasilan kebijakan secara terukur.

Penelitian ini bersifat kontekstual dan studi kasus, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh kebijakan geopark di Indonesia. Karakteristik Geopark Dieng yang bersifat lintas wilayah administratif dan melibatkan dua kabupaten memberikan dinamika kolaborasi yang khas, sehingga hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran mendalam atas konteks kebijakan tertentu.

Keterbatasan penelitian juga terletak pada rentang waktu penelitian yang bersifat potret sesaat. Penelitian ini belum mampu menangkap dinamika perubahan kolaborasi dalam jangka panjang, termasuk kemungkinan pergeseran kepentingan, kekuasaan, dan urgensi *stakeholder* seiring dengan perkembangan status dan pengelolaan Geopark Dieng ke depan.

Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami hambatan kolaborasi kebijakan konservasi di tingkat daerah. Keterbatasan ini justru membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk memperdalam dan memperluas kajian mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan geopark dan kebijakan lingkungan di Indonesia.

### 4.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

#### 1. Integrasi Sumber Pendanaan

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan paling signifikan dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme pendanaan alternatif melalui kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership), pemanfaatan dana CSR perusahaan, dan kolaborasi dengan lembaga donor yang berfokus pada konservasi lingkungan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan integrasi lintas OPD agar pendanaan kegiatan geopark tidak bergantung pada satu dinas saja. Pendekatan lintas sektor akan meningkatkan efisiensi dan kesinambungan pendanaan program geopark.

#### 2. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Aktor Utama

Efektivitas kebijakan konservasi tidak akan tercapai tanpa pelibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan literasi geopark masyarakat kawasan Dieng melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan usaha berbasis konservasi. Program pemberdayaan ini dapat difokuskan pada pengembangan geowisata, produk ekonomi kreatif lokal, dan event berbasis budaya seperti Geo Culture Festival atau Festival Geothermal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek

kebijakan, tetapi turut menjadi subjek yang berdaya dalam menjaga kelestarian kawasan.

3. Sinkronisasi Program Prioritas Antar Daerah Perbedaan prioritas pembangunan antara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo sering menjadi hambatan koordinasi. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu berperan aktif sebagai mediator dalam menyusun rencana aksi bersama (joint action plan) yang memuat pembagian peran dan target waktu yang jelas. Sinkronisasi program ini akan memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan mencegah tumpang tindih kebijakan.
4. Penguatan Kolaborasi Akademik dan Riset Terapan Penulis juga menyarankan agar pengelolaan Geopark Dieng didukung oleh riset kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai geodiversity, biodiversitas, dan budaya lokal dapat dijadikan dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan pengelolaan geopark. Kerja sama ini sekaligus dapat memperkuat posisi Geopark Dieng sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan inovasi berbasis daerah.
5. Penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan aktor dengan melibatkan perspektif masyarakat lokal, pelaku UMKM, komunitas budaya, dan sektor swasta. Pendekatan ini penting untuk memahami secara lebih utuh dinamika kolaborasi, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis geopark dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun cakupan data

lapangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus kajian dengan menggali lebih dalam aspek-aspek yang belum dibahas secara komprehensif, terutama yang berkaitan dengan efektivitas kolaborasi antarsektor dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk menambahkan perspektif dari penerima manfaat langsung, seperti pelaku usaha mikro, komunitas wisata, dan masyarakat sekitar kawasan Geopark Dieng, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang implementasi kebijakan konservasi. Selain itu, studi perbandingan terhadap program kebijakan serupa di daerah lain akan memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengelolaan Geopark Dieng di masa mendatang.